

Analisis Belanja Modal Dan Belanja Sosial Dalam Apbd Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Charles Fransiscus Ambarita¹, Christella Miranda Josephine Simbolon²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: ¹charlesambarita@unimed.ac.id, ²christellasimbolon@gmail.com

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja modal dan belanja sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2016–2025. Dalam konteks desentralisasi fiskal, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, di mana tingkat kemiskinan dijadikan sebagai variabel terikat, sedangkan belanja modal dan belanja sosial sebagai variabel bebas. Data penelitian bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik dan laporan realisasi APBD. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang tercermin dari nilai signifikansi uji F sebesar 0,150 (>0,05). Secara parsial, belanja modal memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan, sedangkan belanja sosial menunjukkan hubungan positif yang juga tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,419 mengindikasikan bahwa variasi tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut hanya sebesar 41,9%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peran kebijakan fiskal daerah dalam menurunkan kemiskinan masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran belanja sosial, dampak belanja modal yang bersifat jangka panjang, serta adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kualitas perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta penerapan kebijakan berbasis outcome guna meningkatkan efektivitas APBD dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Belanja Modal, Belanja Sosial, Kemiskinan, APBD, Desentralisasi Fiskal

Abstract– This study aims to examine the effect of capital expenditure and social expenditure within the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on poverty levels in North Sumatra Province during the 2016–2025 period. Within the framework of fiscal decentralization, APBD serves as a strategic policy instrument to stimulate economic growth and enhance public welfare. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis, where poverty rate is treated as the dependent variable, while capital expenditure and social expenditure act as independent variables. The data are derived from publications of the Central Bureau of Statistics and regional budget realization reports. The findings indicate that, simultaneously, both independent variables do not have a significant effect on poverty levels, as reflected by the F-test significance value of 0.150 (>0.05). Partially, capital expenditure shows a negative but insignificant relationship with poverty, whereas social expenditure demonstrates a positive and insignificant relationship. The coefficient of determination (R^2) of 0.419 suggests that only 41.9% of the variation in poverty levels can be explained by these variables, while the remaining proportion is influenced by other factors the research model. These results imply that the effectiveness of regional fiscal policy in reducing poverty remains limited. This condition is influenced by several factors, including inaccurate targeting of social spending, the long-term impact nature of capital expenditure, and regional development disparities. Therefore, improvements in planning quality, budget allocation accuracy, and outcome-based policy implementation are necessary to optimize the role of APBD in sustainable poverty alleviation.

Keywords: Capital Expenditure, Social Expenditure, Poverty, Regional Budget (APBD), Fiscal Decentralization

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk reformasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembangunan melalui desentralisasi fiskal. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. APBD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemandirian keuangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) [1], [2]. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan PAD dan pengelolaan pajak daerah yang optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan APBD berkaitan erat dengan indikator kinerja keuangan daerah, seperti tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer, serta efektivitas dan efisiensi anggaran.

Analisis indikator tersebut penting untuk menilai dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja ekonomi. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antar daerah, di mana sebagian daerah sudah mandiri, sementara yang lain masih bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, [3], [4] komponen pendapatan dan belanja daerah juga terbukti berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, meskipun kualitas belanja dan alokasi anggaran produktif masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, analisis keterkaitan antara APBD dan kinerja ekonomi menjadi penting, khususnya melalui pengukuran rasio desentralisasi fiskal, kemandirian, dan efektivitas. Rendahnya tingkat desentralisasi fiskal di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan fiskal daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori Keynesian dan teori pertumbuhan endogen [5], belanja modal dalam APBD merupakan investasi publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta penelitian. Menurut UU No. 17/2003, belanja modal adalah pengeluaran yang membentuk aset tetap dengan manfaat lebih dari satu tahun. Diharapkan memberikan *double dividend*: efek pengganda terhadap PDRB jangka pendek dan peningkatan kapasitas produksi jangka panjang. Belanja modal berteoris memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan melalui tiga jalur: menurunkan biaya akses ke pasar dan layanan publik, menyerap tenaga kerja tidak terampil, serta mendorong sektor padat karya.

Namun, hasil empiris di Indonesia beragam: beberapa studi menemukan pengaruh negatif signifikan, sementara studi lain (misalnya di Kota Ternate) melaporkan pengaruh positif tidak signifikan, sehingga masih terbuka peluang penelitian lebih lanjut. Teori *social safety net* menjelaskan belanja sosial sebagai intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan melalui transfer pendapatan (bantuan tunai, subsidi pangan, beasiswa, jaminan kesehatan). Di Indonesia, dasar hukumnya Permendagri No. 13/2018 dan No. 15/2024, dengan prinsip selektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Belanja sosial memiliki dua orientasi: konsumtif jangka pendek (BLT, BPNT) dan pemberdayaan jangka panjang (PKH, pelatihan, modal UMKM). Belanja sosial memengaruhi kemiskinan secara langsung melalui peningkatan pendapatan disposabel dan investasi sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan).

Hasil empiris nasional [6], [7] menunjukkan pengaruh negatif signifikan, tetapi studi di beberapa provinsi menemukan ketidakefektifan akibat ketidaktepatan sasaran. Secara teoritis, efektivitas belanja sosial sangat bergantung pada kualitas institusi dan ketepatan sasaran, sesuai teori perlindungan sosial dan redistribusi pendapatan. Pemahaman tentang kemiskinan sebagai variabel dependen dalam analisis kebijakan fiskal daerah membutuhkan landasan konseptual dan metode pengukuran yang jelas. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mendefinisikan kemiskinan, yaitu kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan dihitung dari gabungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang setara dengan konsumsi 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang mencakup kebutuhan minimum seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dengan demikian, seseorang dinyatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah ambang batas tersebut. Pada tingkat daerah, kemiskinan di Sumatera Utara dipengaruhi secara kuat oleh struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Ketergantungan pada komoditas seperti kelapa sawit dan karet membuat tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, sangat sensitif terhadap perubahan harga di pasar global. Selain itu, adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pantai timur yang lebih maju dan wilayah pantai barat serta Kepulauan Nias yang relatif tertinggal menambah kompleksitas persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan tidak hanya untuk menekan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mendorong pemerataan pembangunan melalui APBD. Pengukuran kemiskinan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada persentase penduduk miskin (*headcount index*), melainkan juga mencakup Indeks Kedalaman Kemiskinan (P^1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P^2). Indeks P^1 menunjukkan rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan P^2 mencerminkan tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen yang menekankan konsep *capability deprivation*, Robert Chambers tentang lingkaran deprivasi, serta Michael Todaro dan Stephen C. Smith yang menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam distribusi hasil pembangunan. Melalui pengelolaan APBD yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mengurangi kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan [8], [9], [10] bahwa keterkaitan antara belanja pemerintah daerah dan penurunan kemiskinan tidak bersifat sederhana maupun linear. Secara konseptual, peningkatan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diyakini mampu menghasilkan *multiplier effect* yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, hasil penelitian empiris memperlihatkan adanya perbedaan temuan (*research gap*). Sejumlah studi menyimpulkan bahwa peningkatan belanja modal efektif menurunkan kemiskinan di wilayah Sumatera karena mampu membuka akses ke daerah terpencil. Sebaliknya, penelitian lain [11], [12] menemukan bahwa kenaikan APBD di beberapa kabupaten di Sumatera Utara tidak

selalu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan secara sebanding. Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan anggaran dan masih adanya inefisiensi birokrasi, sehingga dampak kebijakan fiskal belum dirasakan secara merata. Kerumitan hubungan antar variabel tersebut semakin tampak selama masa pandemi COVID-19 pada periode 2020–2022. Sejumlah literatur mencatat adanya perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal daerah melalui langkah refocusing dan realokasi anggaran. Di Sumatera Utara, pemerintah daerah mengalihkan sebagian anggaran dari pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan dan program perlindungan sosial. Kebijakan ini terbukti mampu menekan lonjakan jumlah penduduk miskin dalam jangka pendek. Namun demikian, penundaan pembangunan infrastruktur strategis berdampak pada melambatnya pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor produktif setelah pandemi. Memasuki fase pemulihan hingga proyeksi tahun 2025, keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan prioritas anggaran. Diperlukan strategi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik kemiskinan yang bersifat multidimensional di setiap daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara [13].

Oleh karena itu, efektivitas penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan kausal antara kebijakan fiskal daerah yang tercermin dalam APBD dan pencapaian indikator ekonomi, khususnya tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Pendekatan ini menggabungkan teori ekonomi publik dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menilai sejauh mana kebijakan anggaran mampu memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam periode analisis 2015–2025, kerangka ini tidak hanya berorientasi pada evaluasi historis, tetapi juga bersifat proyektif dengan mengaitkan hasil empiris terhadap dokumen strategis seperti RPJMD dan RKPD provinsi. Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dijelaskan melalui mekanisme transmisi kebijakan fiskal. Belanja daerah, baik dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan infrastruktur maupun belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan, dipandang sebagai instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang [14].

Sementara itu, belanja perlindungan sosial berfungsi sebagai alat stabilisasi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama ketika terjadi tekanan ekonomi seperti fluktuasi harga komoditas perkebunan yang menjadi andalan ekonomi Sumatera Utara. Keterpaduan antara kebijakan anggaran dalam APBD dan arah pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta menekan tingkat kedalaman (P^1) dan keparahan kemiskinan (P^2). Menjelang akhir periode perencanaan pada tahun 2025, kerangka ini menitikberatkan pada evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dalam masa transisi pasca-pandemi [15]. Dokumen RKPD menjadi acuan penting untuk menilai apakah prioritas anggaran telah kembali difokuskan pada pembangunan jangka panjang atau masih didominasi oleh upaya pemulihan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah di Sumatera Utara tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi seperti perubahan harga komoditas dan kondisi geografis wilayah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara belanja daerah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) selama periode 2016–2025, yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diposisikan sebagai variabel dependen yang diukur berdasarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, variabel independen terdiri atas belanja modal yang mencerminkan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur publik, serta belanja sosial yang merepresentasikan instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat [13].

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda guna mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan, baik secara parsial melalui uji t maupun secara simultan melalui uji F . Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model dianalisis melalui koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan. Rangkaian metode ini dirancang untuk menghasilkan bukti empiris yang komprehensif terkait efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan [16].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.647 ^a	.419	.253	.99091

a. Predictors: (Constant), Belanja Sosial, Belanja Modal

Hasil Uji Koefisien Determinan

Nilai R Square sebesar 0,419 menunjukkan bahwa sebesar 41,9% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal dan belanja sosial, sedangkan sisanya sebesar 58,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian [17].

Tabel 2. Uji ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.955	2	2.478	2.523	.150 ^b
	Residual	6.873	7	.982		
	Total	11.828	9			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Belanja Sosial, Belanja Modal

Hasil Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,150 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan belanja sosial secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara [10].

Tabel 3. Uji Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.572	1.256		7.621	.000
	Belanja Modal	-1.081	.699	-.448	-1.547	.166
	Belanja Sosial	.014	.008	.511	1.766	.121

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Uji t (Parsial)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,166 (>0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung menurunkan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, variabel belanja sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,121 (>0,05), sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja sosial cenderung diikuti peningkatan kemiskinan, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

a. Interpretasi Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,419 menunjukkan bahwa variabel belanja modal dan belanja sosial hanya mampu menjelaskan sebesar 41,9% variasi tingkat kemiskinan. Sementara itu, sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kebijakan fiskal daerah. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,150 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, belanja modal dan belanja sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, variabel belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,166 dengan koefisien regresi sebesar -1,081, sedangkan belanja sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,121 dengan koefisien sebesar 0,014. Meskipun arah hubungan belanja modal bersifat negatif sesuai dengan teori, dan belanja sosial menunjukkan hubungan positif, keduanya belum menunjukkan signifikansi statistik yang memadai dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan. Ketidaksignifikanan hasil tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan belanja daerah belum menjadi determinan utama dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam kerangka pemikiran Todaro dan Smith, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi, distribusi pendapatan, serta ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, menurut [4], kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan kapabilitas individu, sehingga intervensi fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan.

b. Analisis Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,166, meskipun memiliki koefisien negatif sebesar -1,081. Secara teoritis, hubungan negatif ini sesuai dengan teori Keynesian dan teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh [18], yang menyatakan bahwa investasi publik melalui pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Namun demikian, tidak signifikannya pengaruh tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan realitas empiris.

Salah satu penjelasan utama adalah adanya efek jangka panjang (*lag effect*) dari belanja modal. Infrastruktur yang dibangun melalui belanja modal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, membutuhkan waktu sebelum dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam periode penelitian yang relatif terbatas, dampak tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, karakteristik pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang masih menghadapi ketimpangan wilayah juga menjadi faktor penting. Pembangunan infrastruktur cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama kawasan perkotaan dan wilayah yang sudah berkembang, sehingga manfaatnya tidak merata dirasakan oleh masyarakat miskin di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan belanja modal tidak secara langsung menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Di sisi lain, efektivitas belanja modal juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam praktiknya, tidak semua proyek belanja modal memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Beberapa proyek mungkin bersifat kurang produktif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak mampu menciptakan *multiplier effect* yang diharapkan. Dalam konteks ini, teori ekonomi publik menegaskan bahwa kualitas belanja lebih penting dibandingkan sekadar besaran anggaran. Dengan demikian, tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis memiliki potensi besar, implementasi di lapangan belum optimal dalam mendorong pengurangan kemiskinan secara nyata.

c. Analisis Belanja Sosial terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sosial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,121 dan koefisien regresi sebesar 0,014. Secara teoritis, belanja sosial merupakan instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan melalui mekanisme transfer langsung kepada masyarakat miskin, sebagaimana dijelaskan dalam teori social safety net. Namun, hasil empiris yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja sosial di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam banyak kasus, program bantuan sosial tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi terbatas. Selain itu, sebagian besar belanja sosial masih bersifat konsumtif dan berorientasi jangka pendek, seperti bantuan tunai dan subsidi. Program-program ini memang mampu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Program perlindungan sosial akan efektif dalam mengurangi kemiskinan jika dirancang tidak hanya sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga sebagai investasi dalam sumber daya manusia [19]. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya pengaruh variabel eksternal yang lebih dominan. Struktur ekonomi Sumatera Utara yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan menyebabkan tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas.

Ketika harga komoditas menurun, pendapatan masyarakat ikut menurun, sehingga dampak belanja sosial menjadi relatif kecil dibandingkan tekanan ekonomi yang terjadi. Selain itu, dalam perspektif Chambers, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakberdayaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, bantuan sosial yang tidak disertai dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau akses permodalan, tidak akan mampu mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan memang berkaitan erat dengan ketidakberdayaan sosial dan ekonomi. Riset terbaru menunjukkan bahwa bantuan sosial penting sebagai jaring pengaman, tetapi untuk mengangkat orang miskin keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, hampir selalu dibutuhkan komponen pemberdayaan (pelatihan, modal, penguatan kapasitas) [20]. Dengan demikian, tidak signifikannya pengaruh belanja sosial menunjukkan bahwa peran belanja sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan belum berjalan secara optimal, baik dari sisi ketepatan sasaran, desain program, maupun keberlanjutan dampaknya.

d. Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Temuan empiris yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial antara belanja modal dan belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan mengindikasikan adanya paradoks dalam implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Utara. Secara teoritis, otonomi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi APBD belum mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mendorong kinerja ekonomi, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan bahwa kualitas kebijakan fiskal daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat serta rendahnya efisiensi pengeluaran publik [21]. Dalam praktiknya, keterbatasan fleksibilitas anggaran akibat dominasi belanja rutin birokrasi menyebabkan ruang fiskal untuk program inovatif menjadi relatif sempit. Selain itu, ketimpangan kinerja keuangan antarwilayah turut memperlemah efektivitas kebijakan fiskal. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah cenderung tidak mampu mengoptimalkan fungsi alokasi APBD pada sektor-sektor produktif. Hal ini diperparah oleh rendahnya kualitas belanja daerah yang belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi, sehingga efek pengganda (multiplier effect) yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Lebih lanjut, karakteristik struktur ekonomi Sumatera Utara yang masih bergantung pada sektor primer, seperti pertanian dan perkebunan, menyebabkan kesejahteraan masyarakat lebih sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global dibandingkan intervensi fiskal daerah. Dengan demikian, efektivitas APBD dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh sinergi antara kualitas alokasi, kapasitas institusional, serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Tanpa harmonisasi tersebut, desentralisasi fiskal berpotensi hanya menghasilkan ekspansi anggaran tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat [22]

e. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan redesain terhadap belanja modal dengan mengarahkan alokasi pada pembangunan infrastruktur yang bersifat inklusif dan mampu membuka akses ekonomi di wilayah tertinggal. Pendekatan berbasis spasial (spatial targeting) menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan menurunkan biaya transaksi ekonomi masyarakat miskin. Kedua, reformulasi belanja sosial perlu difokuskan pada transformasi dari pendekatan jaring pengaman sosial (safety net) yang bersifat konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan (safety rope) yang berorientasi jangka panjang. Integrasi program bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan akses permodalan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin secara berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kualitas tata kelola data menjadi krusial melalui integrasi basis data lintas lembaga, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), BPJS, dan data kependudukan. Langkah ini diperlukan untuk meminimalisir kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan, sehingga efektivitas program sosial dapat ditingkatkan. Keempat, evaluasi kebijakan fiskal perlu bergeser dari pendekatan berbasis realisasi anggaran menuju pendekatan berbasis outcome. Dengan demikian, setiap alokasi APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap indikator sosial-ekonomi, khususnya penurunan kemiskinan. Kelima, dalam konteks pasca-pandemi, pemerintah daerah perlu mengembalikan fokus kebijakan pada pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan ketimpangan, tanpa mengabaikan fungsi stabilisasi sosial yang tetap diperlukan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa besaran anggaran bukan merupakan faktor penentu utama dalam efektivitas kebijakan fiskal daerah. Sebaliknya, kualitas implementasi, ketepatan sasaran, serta keseimbangan antara belanja yang bersifat produktif dan protektif menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan APBD dalam menurunkan kemiskinan. Belanja modal memiliki potensi sebagai instrumen jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas

ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sementara belanja sosial berperan dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Sinergi antara kedua jenis belanja tersebut, apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan perencanaan yang konsisten, berpotensi menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah yang tercermin melalui alokasi belanja modal dan belanja sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, dalam kasus Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian, kedua jenis belanja tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Model analisis mengindikasikan bahwa kontribusi belanja modal dan belanja sosial dalam menjelaskan variasi kemiskinan hanya sebesar 41,9%, sementara sebagian besar lainnya dipengaruhi oleh variabel eksternal di luar model penelitian. Secara lebih rinci, belanja modal memiliki kecenderungan hubungan negatif terhadap kemiskinan yang sejalan dengan kerangka teori ekonomi, tetapi tidak signifikan. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya jeda waktu dalam dampak pembangunan, ketimpangan distribusi infrastruktur antarwilayah, serta belum optimalnya kualitas pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, belanja sosial menunjukkan hubungan positif yang tidak signifikan, yang mengindikasikan adanya kendala dalam ketepatan sasaran, dominasi program yang bersifat jangka pendek dan konsumtif, serta belum terintegrasinya program pemberdayaan ekonomi secara efektif.

Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kebijakan fiskal semata. Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan wilayah, ketergantungan ekonomi pada sektor primer, fluktuasi harga komoditas, serta kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dinamika kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga pada kualitas alokasi dan efektivitas dampaknya. Optimalisasi sinergi antara belanja modal yang bersifat produktif dan belanja sosial yang berbasis pemberdayaan, disertai dengan tata kelola yang baik serta konsistensi kebijakan, menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih efektif di Provinsi Sumatera Utara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENSI

- [1] H. B. Aini and dkk, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2025.
- [2] A. Fitria and dkk, 'Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat', *Equilibrium Journal*, 2023.
- [3] N. Nadofah and dkk, 'Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia: Evaluasi 38 Provinsi', *Dinamika Governance*, 2024.
- [4] S. Hasna, *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi Daerah*. Jurnal BPPK Kemenkeu, 2018.
- [5] B. Juanda and dkk, *Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016.
- [6] S. Yuvanda and dkk, 'Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah', *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 2024.
- [7] S. Zarkasyi and dkk, *Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba*. MSEJ, 2023.
- [8] C. Ukhti, 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022'. 2026.
- [9] Z., 'Haoxing and C', *System*, no. 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- [10] H. Simangunsong and D. Sihotang, 'The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation', *Law Econ*, vol. 17, no. 2, pp. 73-91, 2023, doi: 10.35335/laweco.v17i2.2.
- [11] R. M. Anggraeni, M. Khusaini, and F. Prasetyia, 'Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia', *Bull. Islam. Econ*, vol. 1, no. 2, pp. 35-48, 2023, doi: 10.14421/bie.2022.012-04.

- [12] R. Fitrianti, M. Zaenal, S. Fattah, and N. Hidayah, 'Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From the Central Government To Provincial Regions in Indonesia', *Public Munic. Financ.*, vol. 14, no. 1, pp. 54-64, 2025, doi: 10.21511/pmf.14(1).2025.05.
- [13] B. P. S. P. S. Utara, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024*. Medan: BPS Sumut, 2024.
- [14] B. P. S. Utara, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023'. Medan, 2021.
- [15] A. H. Nasution, 'Dampak Realokasi Anggaran (Refocussing) Terhadap Indikator Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara Selama Masa Pandemi', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, pp. 112-128, 2023.
- [16] W. Bank, *Social Safety Nets in Indonesia: Achievements and Challenges*. Washington DC: World Bank Group, 2020.
- [17] P. P. S. Utara, 'Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025'. Medan, 2024.
- [18] R. Chambers, 'Poverty and livelihoods: Whose reality counts?', *Environment & Urbanization*, vol. 7, no. 1, pp. 173-204, 1995, doi: 10.1177/095624789500700106.
- [19] Z. Haoxing and C. System, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*.
- [20] H. Simangunsong and D. Sihotang, 'The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation', *Law and Economics*, vol. 17, no. 2, pp. 73-91, 2023, doi: 10.35335/laweco.v17i2.2.
- [21] R. Fitrianti, M. Zaenal, S. Fattah, and N. Hidayah, 'Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From the Central Government To Provincial Regions in Indonesia', *Public and Municipal Finance*, vol. 14, no. 1, pp. 54-64, 2025, doi: 10.21511/pmf.14(1).2025.05.
- [22] R. M. Anggraeni, M. Khusaini, and F. Prasetyia, 'Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia', *Bulletin of Islamic Economics*, vol. 1, no. 2, pp. 35-48, 2023, doi: 10.14421/bie.2022.012-04.